

THE ETHICAL DILEMMA ON FAITH BASED HUMANITARIAN ACT TOWARDS REFUGEES

DILEMA ETIKA DALAM BANTUAN KEMANUSIAAN BERDASARKAN KEPERCAYAAN TERHADAP PENGUNGS

<https://10.0.205.137/jikk.v8i1.678>

Submitted: 03-01-2025 Reviewed: 14-02-2025 Published: 28-02-2025

Khansa Deryqa Prihadiansyah

Khansaderyqa@poltekip.ac.id

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Salsabila Andi Jani

Salsabilaaj@poltekim.ac.id

Politeknik Imigrasi

Abstract NGOs has successfully turned into one of the most important actor in today's global life, most of time by filling the gap of social welfare that the government from certain states can't fill or by giving help to groups that are not protected by their home state's government. The example for this case would be the humanitarian act towards refugees. NGOs can be built from a lot of different background, one of them is faith or religion. Helps and facilities from faith groups for people in needs have been part of our life since long time ago. But there is a dilemma when faith based organizations try to slip some efforts to spread their beliefs into their programs to help people. The dilemma is about whether this practice is ethical or not, especially because the receiver of these aids are in the weak condition, both in identities and their ability to receive influence from other actors. This paper will talk about how faith based organizations help people, especially by giving humanitarian aids toward refugees and how they spread their beliefs within related programs, and also how this turn into a dilemma despite the fact that the receiver is accepting it.

Keywords: NGO, FBO, Faith, Religion, Humanitarian Aid, Dilemma, Refugee

Abstrak NGOs berhasil menjadi salah satu aktor penting dalam kehidupan global saat ini, sering kali dengan cara mengisi kekurangan yang dimiliki pemerintahan sebuah negara dalam urusan kesejahteraan masyarakatnya atau memberi bantuan pada kelompok yang tidak dilindungi oleh negara asal mereka. Salah satunya ialah dengan memberikan bantuan kemanusiaan pada pengungsi. NGOs dapat dibentuk dengan berbagai latar belakang, misalnya kepercayaan atau agama. Bantuan dan fasilitas yang diberikan oleh kelompok agama terhadap orang-orang yang membutuhkan sudah menjadi bagian kehidupan sejak lama. Namun muncul dilema ketika bantuan tersebut diberikan bersamaan dengan upaya penyebaran kepercayaan yang dianut oleh organisasi tersebut. Dilema ini terkait etis tidaknya hal tersebut, khususnya karena penerima bantuan berada dalam kondisi yang lemah, baik secara identitas maupun secara kemampuan dipengaruhi oleh pihak luar. Tulisan ini akan membahas mengenai bantuan, khususnya bantuan kemanusiaan yang diberikan organisasi berlatar kepercayaan pada pengungsi serta bagaimana mereka menyebarkan kepercayaan dalam program yang dijalankan, dan bagaimana hal ini dianggap



Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

sebuah dilema meski penerima bantuan tidak menolak ajaran kepercayaan yang diberikan.

Keywords: *NGO, FBO, Kepercayaan, Agama, Bantuan Kemanusiaan, Dilema, Pengungsi*

1. INTRODUCTIONS

Non-governmental Organizations atau NGOs merupakan salah satu aktor penting global dengan pengaruh besar pada saat ini. NGOs memiliki berbagai agenda seperti bantuan kemanusiaan, bantuan pembangunan, mendorong hak asasi manusia, berupaya untuk menjaga lingkungan, dan sebagainya (Jayasinghe, 2007). NGOs dapat bergerak di negara yang kuat maupun yang lemah, sebab setiap negara memiliki masalah mereka sendiri. Permasalahan yang ada dalam negara yang lemah ialah masuknya pihak elit ke dalam pemerintahan akibat kekosongan kekuasaan sehingga menyebabkan permasalahan dalam pemerintahan, serta kompetisi dalam dominasi dan kontrol atas unsur demokrasi (Whaites, 1998). Sementara permasalahan dalam negara yang kuat ialah kemungkinan besar kekuatan yang ada hanya berada di tingkat pembentukan kebijakan, selain itu kebanyakan badan negara akan diambil alih oleh kelompok sosial masyarakat, seperti negara yang kuat pemerintahannya di tingkat pusat namun hampir tidak memiliki peran apapun di pedesaan, sehingga kemudian posisinya diisi oleh NGOs yang berkeinginan membantu masyarakat (Whaites, 1998).

Pentingnya peran NGOs dalam berbagai kondisi menyebabkan jumlah NGO terus bertambah, begitupula latar belakangnya yang semakin beragam. Peningkatan ini juga terjadi pada NGO dengan latar belakang kepercayaan atau agama. Semakin banyaknya jumlah NGO dengan latar kepercayaan atau yang disebut dengan *faith based organizations* (FBO) berhubungan dengan semakin banyaknya observasi tentang peran FBO di masyarakat dan bagaimana peran mereka lebih terlihat dibandingkan organisasi sekuler atau badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah (Bielefeld & Cleveland, 2013). Peningkatan ini juga berhubungan dengan bagaimana kepala agama dan institusi kepercayaan dapat membangun hubungan interpersonal yang lebih baik dengan masyarakat tempat program NGOs terkait dilakukan, dimana biasanya dilakukan pada wilayah berkonflik.

NGOs sering kali mengalami isu terkait dilema atas tindakan mereka. INGOs sering dihadapkan pada isu atas etis tidaknya tindakan mereka di wilayah asing, khususnya pada

saat melakukan kegiatan yang terkait dengan bantuan kemanusiaan (Bell & Carens, 2004). Bell dan Carens (2004) menjelaskan bahwa ada sejumlah dilema yang biasa dihadapi INGOs, yang pertama adalah konflik antara hak asasi manusia dengan norma budaya lokal, dengan permasalahan utama ialah keharusan mentoleransi kepercayaan yang saling bertentangan, melawan norma budaya lokal, dan merevisi prinsip serta pelaksanaan HAM (Bell & Carens, 2004). Yang kedua adalah meningkatnya ketegangan antara upaya melebarkan dan membatasi mandat organisasi seperti Amnesty Internasional, *Human Rights Watch*, dan INGO kemanusiaan kemanusiaan (Bell & Carens, 2004). Yang ketiga adalah dilema akan perlu tidaknya bekerja sama dengan pemerintah, dimana biasanya dibagi sesuai dua strategi yang digunakan oleh INGOs terkait, yaitu yang mau bekerja sama (*The Collaborators*) dan yang menolak (*The Critics* kemanusiaan (Bell & Carens, 2004). Yang keempat ialah dilema mengenai batas etis penggalangan dana sebab adanya konflik atas sumber dana dan tujuan penggalangan dana tersebut dilanjutkan kemanusiaan (Bell & Carens, 2004).

Dapat dilihat dari penjelasan diatas bahwa salah satu dilema yang dihadapi oleh INGOs ialah isu mengenai kepercayaan yang dibawa oleh INGOs dan kepercayaan yang dianut oleh penduduk lokal atau target program yang dijalankan oleh INGOs terkait, sehingga tidak mengherankan bahwa kemudian muncul dilema khusus yang berhubungan FBO. Dilema yang kemudian muncul terkait FBO ialah tentang etis tidaknya suatu aktivitas ketika program yang dijalankan oleh NGOs berlatar belakang kepercayaan terkait memasukkan unsur dakwah atau pengaruh kepercayaan mereka pada saat memberikan bantuan kemanusiaan (Jayasinghe, 2007). Pengaruh ini biasanya diberikan pada saat mereka memberikan bantuan kemanusiaan pada negara yang lemah atau yang terdampak bencana atau konflik (Jayasinghe, 2007). Tindakan ini dapat mempengaruhi dan menyebabkan adanya benturan kepentingan antara kepentingan tindakan kemanusiaan dan penyebaran kepercayaan (Jayasinghe, 2007).

Salah satu situasi yang mengekspos masyarakat atau negara menjadi lebih lemah hingga membutuhkan bantuan kemanusiaan ialah konflik yang mendorong adanya pengungsi. Selain bergerak untuk membantu pemerintahan sebuah negara, NGOs, yang didalamnya termasuk FBO, juga bekerja untuk membantu kelompok dan individu yang membutuhkan bantuan dalam berbagai cara. Salah satu kelompok non pemerintah yang dibantu oleh NGOs adalah kelompok pengungsi. Pengungsi merupakan kelompok atau individu yang kabur dari wilayah asal mereka untuk mendapat perlindungan dari

ancaman sebab mereka memiliki identitas tertentu, seperti suku atau kepercayaan (UNHCR, t.t.). Pengungsi sendiri merupakan kelompok yang membutuhkan bantuan kemanusiaan sebab mereka sedang tidak dilindungi negara, sering kali kehilangan identitas mereka, dan yang terpenting mereka membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup. Namun dalam upaya memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi, FBO sering kali menyelipkan upaya untuk menyebarkan kepercayaan yang mereka anut dalam program yang mereka jalankan.

Ada beberapa permasalahan etis yang disebabkan ketika NGOs menggabungkan bantuan kemanusiaan dengan upaya menyebarkan kepercayaan mereka (Jayasinghe, 2007). Yang pertama ialah saat NGOs memilih negara yang dianggap membutuhkan bantuan kemanusiaan, selain melihat faktor kebutuhan masyarakat, akan muncul isu mengenai keetisan ketika negara yang dipilih memiliki populasi dengan SARA tertentu sebab NGOs seharusnya memberi bantuan tanpa memperhitungkan hal semacam ini karena merupakan tindakan diskriminatif dan melanggar peraturan (Jayasinghe, 2007). Yang kedua ialah apabila NGOs dengan latar belakang agama melakukan penyebaran kepercayaan pada masyarakat di negara yang dituju akan muncul ketidakpercayaan atas intervensi dan bantuan yang diberikan (Jayasinghe, 2007). Yang ketiga ialah adanya kekuatan yang dimiliki NGOs lebih besar dibanding masyarakat bahkan pemerintah yang tengah bermasalah, sehingga penyebaran kepercayaan merupakan eksploitasi kekuatan dan tidak bersifat etis (Jayasinghe, 2007). Dan yang terakhir adalah masalah atas keetisan negara yang menyetujui penyebaran kepercayaan yang dilakukan oleh NGOs dengan latar belakang agama sebab mereka membutuhkan bantuan (Jayasinghe, 2007).

Permasalahan terkait unsur kepercayaan yang diselipkan dalam kegiatan kemanusiaan ini seringkali muncul ketika NGO berlatar belakang agama memberikan bantuan kepada pengungsi, yang akan penulis bahas dengan lebih jelas pada tulisan ini dengan menggunakan dua kasus pengungsi, yaitu pengungsi Karen dari Myanmar dan pengungsi Syria di Turki.

2. METHOD

Dari penjelasan diatas maka tulisan ini akan didasarkan pada pertanyaan penelitian “Bagaimana peran NGO dengan latar belakang kepercayaan pada isu pengungsi dan dilema terkait peran dan ajaran kepercayaan yang mereka selipkan ke dalamnya?”

Kelompok agama sudah menjadi salah satu fasilitator bantuan sejak jaman dahulu, seperti jaringan gereja yang membangun sekolah dan rumah sakit atau kelompok muslim yang membagikan zakat dan sedekah pada yang membutuhkan. Aktivitas dengan tujuan bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh kelompok dengan latar belakang kepercayaan atau agama sering kali diikuti dengan penyebaran kepercayaan yang dibawa. Namun apabila kita berbicara tentang NGO, maka hal ini menimbulkan dilema terkait pantas atau etis kah hal ini dilakukan.

Sudah dijelaskan bahwa bukan hal yang aneh bagi NGOs untuk menghadapi sejumlah dilema, salah satunya terkait nilai dan kepercayaan yang mereka bawa ketika dihadapkan dengan kepercayaan lokal dan norma yang ada. Hal ini juga terjadi pada organisasi berbasis agama atau FBO. Penyebaran kepercayaan yang diselipkan dalam program yang dijalankan oleh NGOs berlatar kepercayaan dianggap tidak etis sebab penyebaran kepercayaan dilakukan kepada kelompok yang lebih lemah sehingga dapat dilihat sebagai penyalahgunaan kekuatan dan kemampuan. Hal ini jelas tidak diperbolehkan dalam pelaksanaan bantuan kemanusiaan. Apalagi jika dilakukan kepada kelompok pengungsi yang dibahas dalam tulisan ini. Pengungsi tidak memiliki perlindungan dan sering kali identitasnya dirampas oleh negara asal mereka sendiri, sehingga akan sulit bagi pengungsi untuk menolak pengaruh yang diberikan pada mereka oleh NGOs, aktor yang seharusnya membantu mereka tanpa mengharapkan balasan.

3. RESERCH

Organisasi non pemerintah internasional (INGOs) merupakan aktor yang bergerak di berbagai bidang dengan membangun hubungan kooperatif satu sama lain, dengan organisasi lokal, dan organisasi internasional kemanusiaan (Bell & Carens, 2004). Bersamaan dengan terbukanya dunia dan menghilangnya batas-batas akibat globalisasi dan internasionalisme, pengaruh NGO juga semakin terlihat dalam hubungan internasional. Organisasi non pemerintah atau yang biasa disingkat dengan NGOs memiliki sudut pandang dan alasan berdiri

yang berbeda, sesuai dengan nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Biasanya NGO dibangun untuk mencapai tujuan yang dapat menguntungkan banyak pihak, sehingga NGOs dapat muncul dari berbagai latar belakang atau nilai dasar. NGOs dapat muncul dengan didasari politik, sosial, dan kepercayaan atau agama (Jayasinghe, 2007). Terdapat peningkatan jumlah NGOs yang bergerak untuk memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk NGOs yang muncul atas dasar kepercayaan (Jayasinghe, 2007).

NGOs berlatar kepercayaan (faith based organizations) biasa disingkat dengan FBO. Dalam tulisan ini penulis menggunakan penjelasan Ebaugh, et al. (2016) tentang kepercayaan, yang berarti komitmen seseorang atas sebuah agama yang melewati satu dimensi. NGOs yang didasari oleh kepercayaan atau agama memiliki sejumlah karakteristik berupa ikatan formal dengan badan agama, misi atau objektif jelas atas suatu nilai agama, mendapat bantuan finansial dari pemerintah yang diisi oleh penganut agama tertentu, serta proses pembentukan kebijakannya didasari oleh nilai agama (Jayasinghe, 2007).

Menurut Bielefeld & Cleveland (2013), untuk memahami tentang organisasi berbasis agama peneliti biasanya berfokus pada sejumlah tipologi dengan 3 kategori informasi yang biasanya serupa, yaitu yang pertama kontrol organisasi yang dilihat dari sumber dana, kekuatan internal organisasi, dan proses pembentukan kebijakan; yang kedua pengekspresian agama yang dilihat dari identitas agama organisasi dan anggota, serta outcome; dan yang ketiga implementasi program yang dilihat dari bantuan yang diberikan, elemen agama dalam program yang ada, dan wajib tidaknya partisipasi dalam aktivitas keagamaan tertentu.

Munculnya NGO dengan latar belakang kepercayaan bukanlah hal yang mengejutkan. Agama sudah sering menjadi dasar terbentuknya komunitas yang kemudian bergerak untuk membantu masyarakat. Misalnya pembentukan sistem pendidikan, bantuan sosial, dan rumah sakit oleh kelompok Katolik pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 (Bielefeld & Cleveland, 2013). Atau komunitas Muslim yang memberikan bantuan melalui zakat dan sedekah, serta pembangunan klinik kesehatan di Amerika Serikat (Bielefeld & Cleveland, 2013).

Organisasi berbasis agama atau kepercayaan sempat diabaikan karena

munculnya organisasi sekuler dan negara yang mengambil alih peran pemenuhan kesejahteraan sosial yang merupakan hasil dari modernisasi rancangan sistem kesejahteraan sosial pada pertengahan abad ke-20 (Bielefeld & Cleveland, 2013). Modernisasi ini menjadikan peran atas kebutuhan tertentu perlu dipenuhi oleh badan khusus, padahal sebelumnya kelompok yang berdasarkan agama atau kepercayaan sering kali melakukan kegiatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial (Bielefeld & Cleveland, 2013). Namun pada akhir abad yang sama dilakukan reevaluasi atas peran kelompok agama dan peran mereka terhadap masyarakat ketika pemerintah dan kelompok sekuler yang muncul akibat modernisasi menghadapi penilaian atas kemampuan mereka mensejahterakan masyarakat (Bielefeld & Cleveland, 2013). Reevaluasi ini muncul sebab masyarakat menolak pemerintah yang menjadikan pelaksanaan atau praktik agama sebagai hal yang diprivatisasi (Khafagy, 2020). Dari hasil reevaluasi ini ditemukan bahwa kelompok dan komunitas agama memiliki tingkat kesuksesan yang lebih tinggi dalam menyediakan bantuan dan berkontribusi atas kesejahteraan masyarakat (Bielefeld & Cleveland, 2013). Kontribusi ini meningkat ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bersifat neoliberal, dimana masyarakat memiliki tanggung jawab sosial dan ekonomi yang lebih besar sehingga dana yang didapat dari masyarakat untuk mendorong kesejahteraan publik semakin berkurang (Khafagy, 2020).

Terjadi peningkatan peran FBO pada pertengahan tahun 1980-an yang disalurkan melalui kegiatan sukarelawan, donasi, dan membuka akses kelompok yang kurang berkembang (Khafagy, 2020). Peningkatan ini berbanding lurus dengan semakin banyaknya jumlah peneliti ilmu sosial dan aktivis masyarakat yang melakukan penelitian terhadap peran FBO (Khafagy, 2020).

Kesehatan merupakan salah satu fokus utama komunitas kepercayaan seperti yang sudah kita lihat dari contoh yang disampaikan oleh Bielefeld dan Cleveland. Tahun 1990 hingga 2000 merupakan tahun yang dianggap para penulis sebagai periode gerakan kepercayaan dan kesehatan (DeHaven dkk., 2004). Penelitian yang dilakukan DeHaven dan rekan-rekannya (2003) menunjukkan bahwa program kesehatan yang dijalankan oleh organisasi atau komunitas kepercayaan berhasil membawa dampak baik di bidang kesehatan.

Hal ini juga ditemui dalam program yang dijalankan oleh NGO berlatar kepercayaan, yang kemudian berkembang menjadi bantuan kemanusiaan (Jayasinghe, 2007). Bantuan kemanusiaan yang disediakan oleh organisasi berlatar kepercayaan dapat berupa pencegahan dan bantuan pasca kejadian berbahaya (Jayasinghe, 2007).

Agar dapat memahami dengan baik pembahasan utama tulisan ini mengenai dilema dalam penyebaran kepercayaan yang dilakukan oleh NGOs berlatar kepercayaan, maka kita harus memahami terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan bantuan kemanusiaan atau humanitarian aid. Bantuan kemanusiaan merupakan bantuan yang dapat digunakan dan bermanfaat secara langsung bagi penerimanya pada kondisi darurat dengan tujuan utama menyelamatkan hidup dan mengurangi penderitaan (Concern Worldwide US, 2020). Menurut Concern Worldwide (2020) PBB telah menetapkan sejumlah prinsip dasar bantuan kemanusiaan dengan 4 prinsip utama, yaitu kemanusiaan; ketidakberpihakan; netral; dan tidak dipengaruhi nilai politik, ekonomi, atau militer.

Organisasi berlatar kepercayaan sering kali menghubungkan ajaran kepercayaan mereka dengan misi yang dijalankan, baik sebagai dasar pelaksanaan maupun untuk disebarkan pada saat pelaksanaan. Namun tindakan ini menimbulkan dilema atas etis tidaknya hal tersebut dilakukan, khususnya karena penyebaran kepercayaan dilakukan pada pihak yang lebih lemah daripada NGO terkait.

Mengapa hal ini dianggap bermasalah, sementara penerima bantuan dan kepercayaan tersebut tidak keberatan?

Ada beberapa hal yang menyebabkan isu mengenai keetisan yang menjadi dilema muncul ketika NGOs menggabungkan bantuan kemanusiaan dengan upaya menyebarkan kepercayaan yang menjadi dasar pembentukan organisasi tersebut, yang pertama ialah saat NGOs memilih negara yang dianggap membutuhkan bantuan kemanusiaan, selain melihat faktor kebutuhan masyarakat, akan muncul isu mengenai keetisan ketika negara yang dipilih memiliki populasi dengan SARA tertentu sebab NGOs seharusnya memberi bantuan tanpa memperhitungkan hal semacam ini karena merupakan tindakan

diskriminatif dan melanggar peraturan (Jayasinghe, 2007). Yang kedua ialah apabila NGOs dengan latar belakang agama melakukan penyebaran kepercayaan pada masyarakat di negara yang dituju akan muncul ketidakpercayaan atas intervensi dan bantuan yang diberikan (Jayasinghe, 2007). Yang ketiga ialah adanya kekuatan yang dimiliki NGOs lebih besar dibanding masyarakat bahkan pemerintah yang tengah bermasalah, sehingga penyebaran kepercayaan merupakan eksploitasi kekuatan dan tidak bersifat etis (Jayasinghe, 2007). Dan yang terakhir adalah masalah atas keetisan negara yang menyetujui penyebaran kepercayaan yang dilakukan oleh NGOs dengan latar belakang agama sebab mereka membutuhkan bantuan (Jayasinghe, 2007).

Sehubungan dengan isu keetisan pertama yang disampaikan oleh Jayasinghe, dimana NGOs yang sudah memiliki niat untuk melakukan penyebaran kepercayaan mereka melalui program bantuan kemanusiaan, penulis melihat bahwa hal ini menjadikan FBO tersebut tidak mampu memenuhi 4 prinsip dasar bantuan kemanusiaan yang sudah disampaikan sebelumnya.

Ketika FBO memilih target program berdasarkan kepentingan mereka dan bukannya keadaan individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan, maka FBO tidak lagi menunjukkan ketidakberpihakan dan kenetralan mereka dengan mendahulukan kepentingan organisasi.

Ketidakberpihakan dan kenetralan FBO dapat berubah ketika kita merubah perspektif yang digunakan untuk melihat kelompok yang mendapat bantuan kemanusiaan dari FBO terkait. Karena tulisan ini akan menggunakan studi kasus pengungsi atau kelompok yang dipaksa untuk meninggalkan wilayah asal mereka, maka penulis menggunakan pendapat Orobator (2008) tentang adanya tiga perspektif mengenai pengungsi. Yang pertama ialah pengungsi sebagai urusan politik, dimana pandangan ini melihat bahwa bantuan kemanusiaan dianggap tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang ada dan yang dibutuhkan adalah solusi politik (Orobator, 2008). Yang kedua adalah pengungsi sebagai urusan hak asasi manusia yang beranggapan bahwa isu pengungsi merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga NGOs, khususnya FBO, yang memberikan bantuan kemanusiaan telah melakukan perlindungan yang bersifat

efektif (Orobator, 2008). Dan pandangan yang terakhir ialah pengungsi sebagai urusan amal yang beranggapan bahwa hal yang paling benar dilakukan adalah dengan memberikan para pengungsi bantuan (Orobator, 2008).

Dari tiga perspektif ini kemudian Orobator menjelaskan adanya sejumlah isu yang melibatkan NGOs. Melalui sudut pandang pengungsi sebagai urusan politik terdapat implikasi etis yang mengesampingkan bantuan kemanusiaan ketika jawaban yang dibutuhkan ialah solusi politik dan kebijakan baru; dari sudut pandang pengungsi sebagai urusan hak asasi manusia NGOs cenderung tidak lagi netral dan berpihak pada korban atau mengadvokasikan solidaritas politik; dan dari sudut pandang pengungsi sebagai urusan amal yang melihat bahwa amal merupakan sebuah tindakan kebaikan maka tidak ada jalan keluar yang ditawarkan (Orobator, 2008).

Selain itu FBO juga sering dipengaruhi oleh sejumlah objektif yang menurut prinsip dasar bantuan kemanusiaan tidak boleh dicampur adukan. Hal ini dapat dilihat melalui penjelasan Owuochi (2015) yang menyatakan bahwa ada sejumlah faktor mengapa FBO tidak menjalankan program mereka, yaitu perubahan strategi, dilemma atas urusan agama melawan politik, tidak adanya tentara, hubungan dengan gereja, isu apatisme politik, dan sebagainya. Dari sejumlah faktor yang telah disebutkan, kebanyakan merupakan objektif yang tidak boleh mempengaruhi upaya bantuan kemanusiaan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa kondisi politik tertentu yang tidak mendukung kepercayaan atau agama yang menjadi dasar sebuah FBO akan mencegah bantuan kemanusiaan yang bisa diberikan oleh FBO tersebut, sehingga FBO dapat dipertanyakan akuntabilitasnya.

Ketidakmampuan FBO dalam memenuhi prinsip dasar bantuan kemanusiaan akan mempengaruhi akuntabilitas NGOs. Akuntabilitas INGOs sendiri bersifat sangat kompleks sehingga dibutuhkan pandangan dari berbagai metodologi (Williams, 2010). Salah satu contoh sudut pandang yang ada ialah sektor kesehatan, dimana dilema terkait penyebaran kepercayaan yang dilakukan oleh FBO berhubungan dengan tiga nilai dasar NGO di mata kesehatan, yaitu peran NGOs semakin kompleks, akuntabilitas NGOs semakin menurun sementara

jumlah NGOs dan banyaknya kepentingan yang mereka bawa terus naik, serta jarang literatur medis membahas isu etis yang disebabkan (Jayasinghe, 2007). Penggunaan sudut pandang sektor kesehatan dilakukan sebab bantuan kemanusiaan sering kali merupakan perpanjangan dari program kesehatan.

Penyebaran kepercayaan yang dilakukan melalui program bantuan kemanusiaan oleh FBO sering kali didapati ketika organisasi terkait memberikan bantuan kepada pengungsi, sebab pengungsi merupakan individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan kemanusiaan dan tidak jarang tengah kehilangan identitas mereka sendiri setelah tidak diakui oleh negara asal mereka atau dipaksa melepaskan identitas demi keamanan, sehingga membuka peluang bagi NGO berbasis kepercayaan untuk menyebarkan kepercayaan mereka.

Dalam tulisan ini penulis akan membahas dua kasus dimana FBO melakukan penyebaran kepercayaan mereka dalam proses pemberian bantuan kemanusiaan pada pengungsi, yaitu pada kasus pengungsi Karen dari Myanmar dan pengungsi Suriah di Turki sebab kedua kelompok pengungsi ini dihadapkan pada dua kepercayaan yang sejak dulu telah menjadi dasar berbagai organisasi dengan pengaruh terbesar di tingkat internasional, yaitu Islam dan Kristen (Khafagy, 2020).

Pengungsi sendiri definisinya ditetapkan dalam Konvensi Pengungsi 1951 dengan penjelasan yaitu orang yang tidak mampu kembali ke negara asal mereka sebab adanya ketakutan akan persekusi atas identitas yang dimiliki (UNHCR, t.t.).

Terdapat lebih dari 150 ribu pengungsi di wilayah perbatasan Thailand dan Myanmar yang mayoritasnya merupakan pengungsi Karen (Horstmann, 2011). Karen sendiri merupakan kelompok etnis asal Cina dan Tibet yang menetap di Myanmar sejak sekitar 2000 tahun lalu dan resmi menjadi salah satu kelompok etnis Myanmar sejak negara tersebut dijajah oleh Inggris (Karen Organization of Minnesota, 2017). Konflik antara kelompok etnis Karen dan Myanmar muncul karena Karen memihak pada

Inggris, dan ketika penjajahan berakhir para masyarakat Karen diusir dari wilayah mereka (Karen Organization of Minnesota, 2017).

Banyak organisasi berlatar agama yang melakukan kontak dengan pengungsi

Karen serta berupaya menyebarkan pengaruh dan ajaran kepercayaan mereka, salah satunya agama Kristen (Horstmann, 2011). Dalam tulisan ini penulis akan berfokus pada penyebaran ajaran agama Kristen kepada pengungsi Karen. Hal ini berdasarkan fakta bahwa secara sejarah Karen yang menganut agama Kristen merupakan salah satu kelompok minoritas yang secara terang-terangan membedakan diri mereka dari penganut Budha di Myanmar dan membangun fasilitas dan infrastruktur lokal untuk menopang kehidupan mereka (Horstmann, 2011).

Bantuan yang diberikan oleh organisasi dan jaringan yang sekaligus melakukan penyebaran agama Kristen kepada pengungsi Karen didasari atas solidaritas yang mendasari ajaran Kristen itu sendiri (Horstmann, 2011). Penyebaran kepercayaan dilakukan dengan menjadikan penganut agama Kristen dengan pengetahuan dan pendidikan yang baik sebagai bagian penting dari gerakan Karen (Horstmann, 2011). Hal ini dilakukan oleh sejumlah organisasi atau gereja, seperti Gereja Baptis Karen Kawthoolei di Thailand dan gereja Kristen di Amerika Serikat yang melakukan kerjasama dengan Karen National Union (Horstmann, 2011).

Contoh lainnya ialah bantuan kemanusiaan yang dilakukan FBO berbasis agama Islam di Turki kepada pengungsi Suriah. Dimana 80% pengungsi ini berasal dari Suriah Utara dengan penyebab utama revolusi yang terjadi di negara asal mereka menimbulkan ancaman bagi keselamatan mereka (Özden, 2013).

Para pengungsi Suriah mayoritasnya beragama Islam, dan agama Islam menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai salah satu dasar ajaran mereka dan kewajiban yang harus dilakukan oleh penganutnya (Krafess, 2005). Hal ini dapat dilihat dari kewajiban zakat dan sedekah, yaitu kewajiban memberikan bantuan bagi orang-orang yang kurang mampu dengan menyisihkan harta sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga bukan hal yang mengejutkan ketika didapati ada banyak FBO berdasarkan agama Islam dalam pelaksanaan bantuan kemanusiaan, termasuk kepada para pengungsi. Dalam Islam sendiri pemberian bantuan kepada pengungsi sudah dilakukan sejak jaman Nabi Muhammad SAW dan terus diterapkan hingga saat ini (Krafess, 2005).

Dalam kasus pengungsi Suriah di Turki, jalur pendidikan merupakan cara yang

dipilih untuk menyebarkan kepercayaan FBO berlatarkan agama Islam dan pemerintah Turki (Mccarthy, 2017). Pendidikan diberikan sebagai cara untuk mengalihkan trauma para pengungsi dan mencegah peningkatan masalah yang dihadapi oleh pengungsi, khususnya anak-anak (Mccarthy, 2017). Unsur Islam yang kental dalam pendidikan disebabkan karena organisasi dengan latar belakang kepercayaan Islam yang berasal dari Turki khawatir bahwa institusi berlatar misionaris Kristen akan memanfaatkan kurangnya pendidikan pengungsi untuk membawa identitas baru dan memperlihatkan kesempatan yang lebih luas di Barat sehingga meninggalkan identitas budaya, agama, dan kepercayaan asal pengungsi (Mccarthy, 2017).

Dari penjelasan dua kasus diatas, terlihat adanya dua persamaan dari cara FBO menyebarkan kepercayaan mereka. Yang pertama ialah latar belakang kelompok pengungsi yang dipilih untuk diberikan bantuan kemanusiaan sudah memiliki anggota kelompok atau individu yang memeluk kepercayaan yang dibawa FBO, bahkan dalam dua kasus ini kedua kelompok pengungsi dimayoritasi oleh pemeluk kepercayaan yang sama dengan yang dimiliki oleh FBO. Penulis melihat bahwa kondisi ini diperlukan agar FBO dapat membangun relasi yang baik dengan kelompok pengungsi tersebut sehingga nantinya dapat menarik lebih banyak pengungsi dengan kepercayaan yang berbeda dan tertarik pada proses penyebaran kepercayaan yang dilakukan oleh FBO terkait. Persamaan yang kedua ialah proses penyebaran kepercayaan dilakukan melalui pendidikan. FBO yang berdasar agama Islam di Turki mengajarkan ilmu pengetahuan yang kental akan ajaran Islam kepada pengungsi Suriah dengan tujuan agar mereka tidak kehilangan identitas sekaligus sebagai upaya menghilangkan trauma, sementara FBO yang berdasar agama Kristen bekerja sama dengan berbagai komunitas gereja untuk kemudian mengirim penganut agama Kristen dengan ilmu dan pengetahuan yang baik untuk mengajar.

Jayasinghe (2007) menyatakan bahwa ada beberapa pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan terkait FBO. Dimana strategi yang paling jelas dan efektif dalam menyelesaikan dilema terkait upaya FBO untuk menyebarkan kepercayaan mereka melalui program bantuan kemanusiaan ialah dengan memisahkan peran bantuan kemanusiaan dengan peran penyebaran kepercayaan (Jayasinghe, 2007). Adapun strategi lainnya

ialah menyediakan informasi agar masyarakat dan pemerintah dapat membentuk kebijakan yang bisa mengatur kerja NGOs (Jayasinghe, 2007). Selain itu ada pula strategi dimana setiap negara membentuk pedoman apabila hendak menerima bantuan kemanusiaan dan strategi dimana code of conduct yang ada bersifat fleksibel atau dapat dimodifikasi untuk menyesuaikan keadaan yang ada agar dapat dipatuhi secara sukarela oleh semua pihak, termasuk FBO (Jayasinghe, 2007).

Hingga saat ini penulis belum menemukan kebijakan yang melarang FBO untuk melakukan penyebaran kepercayaan mereka dalam program bantuan kemanusiaan yang dijalankan. Namun muncul pertanyaan lanjutan, mungkinkah pemisahan tersebut dilanjutkan sementara organisasi yang dibahas berangkat dari suatu kepercayaan?

Barnett dan Stein (Khafagy, 2020) berpendapat bahwa sekularisasi dan masuknya seseorang kedalam sebuah agama merupakan hal yang bertingkat, memiliki sejumlah dimensi, dan bersifat non linear. Hal ini memungkinkan dibentuknya strategi yang dapat dijalankan oleh berbagai aktor yang ingin menjalankan program mereka dengan melakukan pengaturan, stabilisasi, dan modifikasi (Khafagy, 2020). Sekularisasi yang dimaksud Barnett dan Stein membutuhkan dasar yang kuat berupa peningkatan peran negara dan pasar, sentralisasi dana, dan bantuan kemanusiaan yang efektif (Khafagy, 2020). Organisasi kemanusiaan yang tidak berdasarkan agama atau bersifat sekuler memiliki sejumlah ciri khas seperti tidak membawa misi agama tertentu, lebih profesional, dan biasanya lebih didukung oleh pemerintah atau badan yang berhubungan dengan program mereka (Khafagy, 2020).

Dari penelitian yang dilakukan untuk membentuk tulisan ini penulis melihat bahwa tindakan FBO yang menyebarkan kepercayaan mereka dalam melaksanakan program bantuan kemanusiaan merupakan hal yang wajar menjadi dilema sebab tidak adanya dasar hukum yang mengatur. Namun penulis tidak setuju untuk tindakan ini dihapuskan sepenuhnya, sebab dari dua kasus yang digunakan untuk meneliti dilema ini, penyebaran kepercayaan dilakukan tanpa paksaan dan diikuti oleh pengungsi dengan sukarela. Dua kasus yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yang sama dalam

penyebaran kepercayaan mereka, yaitu pendidikan.

Meski pengungsi berada dalam situasi yang menyebabkan mereka lebih lemah dibandingkan NGOs berlatar kepercayaan, tindakan yang dilakukan oleh FBO tidak bersifat koersif dan memaksa, sehingga pengungsi yang merasa apa yang dilakukan oleh NGOs tidak sesuai dengan keinginan mereka dapat tidak mengikuti ajaran tersebut. Selain itu penulis menemukan sejumlah bacaan yang menyatakan bahwa pengungsi yang kemudian melakukan perpindahan ke agama yang disebarkan oleh FBO melakukannya atas rasa ketertarikan sendiri

4. RESULT

Kepercayaan atau agama merupakan salah satu latar belakang pembentukan sejumlah NGOs. Hal ini bukanlah hal yang baru, kelompok kepercayaan atau komunitas agama sudah menjadi bagian dari masyarakat sejak dahulu. Kelompok ini berhasil menjadi salah satu penyedia bantuan dan fasilitas penunjang kesejahteraan masyarakat. Bahkan melalui reevaluasi yang dilakukan untuk melihat pengaruh modernisasi kerangka pemerintahan negara ditemukan bahwa kelompok dan komunitas agama berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mereka bantu lebih baik daripada kelompok sekuler atau organisasi khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk fokus pada satu urusan saja. Isu kesehatan yang kemudian berkembang menjadi bantuan kemanusiaan merupakan salah satu aspek yang menjadi fokus kebanyakan kelompok agama.

Namun ketika membahas mengenai NGOs, cakupan yang dibahas ikut meluas. NGOs merupakan salah satu aktor penting dalam kehidupan global, dimana biasanya mereka berperan penting dalam mengisi kekosongan yang muncul dalam upaya pemerintah memenuhi kesejahteraan rakyatnya atau ketika sebuah kelompok tidak lagi dalam perlindungan pemerintah negara asal mereka, misalnya kelompok pengungsi. Kelompok pengungsi membutuhkan bantuan kemanusiaan yang ditawarkan oleh NGOs, namun kondisi ini sering kali dimanfaatkan oleh NGOs berlatar kepercayaan untuk menyelipkan ajaran dan upaya penyebaran kepercayaan mereka. Meski tidak dilarang secara eksplisit, hal ini tetap menimbulkan dilema atas etis tidaknya penyebaran kepercayaan yang diselipkan dalam program bantuan kemanusiaan yang dijalankan oleh NGO

berlatar kepercayaan atau FBO (faith based organizations). Dilema ini muncul sebab target penyebaran sering kali merupakan kelompok atau pemerintah negara yang lebih lemah dibandingkan NGOs yang menyebarkan kepercayaan tersebut.

Penyebaran kepercayaan dalam menjalankan program mempengaruhi kemampuan NGOs dalam memenuhi prinsip dasar bantuan kemanusiaan yang dikeluarkan oleh PBB, yaitu yaitu kemanusiaan; ketidakberpihakan; netral; dan tidak dipengaruhi nilai politik, ekonomi, atau militer (Concern Worldwide US, 2020). Hal ini jelas mempengaruhi akuntabilitas NGOs terkait. Akuntabilitas NGOs merupakan hal yang kompleks dan perlu dibahas melalui berbagai metodologi (Williams, 2010). Salah satunya ialah melalui sudut pandang kesehatan, dimana dilema ini terkait dengan 3 prinsip utama, yaitu peran NGOs semakin kompleks, akuntabilitas NGOs semakin menurun sementara jumlah NGOs dan banyaknya kepentingan yang mereka bawa terus naik, serta jarang literatur medis membahas isu etis yang disebabkan (Jayasinghe, 2007).

Dalam tulisan ini penulis melihat bagaimana FBO menyebarkan kepercayaan mereka dalam program yang dijalankan untuk memberi bantuan kemanusiaan pada pengungsi melalui kasus pengungsi Karen di perbatasan Thailand yang berasal dari Myanmar dan pengungsi Suriah yang berada di Turki. Pengungsi sendiri merupakan kelompok atau individu yang kabur dari wilayah asal mereka untuk mendapat perlindungan (UNHCR, t.t.)

Pada kasus pengungsi Karen, ada cukup banyak organisasi dan komunitas dengan latar belakang agama yang berbeda, namun dalam tulisan ini penulis berfokus pada agama Kristen yang menjadi salah satu agama yang melatar belakangi bantuan bagi pengungsi Karen. Horstmann (2011) mengatakan bahwa bantuan yang diberikan oleh organisasi dan jaringan yang sekaligus melakukan penyebaran agama Kristen kepada pengungsi Karen didasari atas solidaritas yang mendasari ajaran Kristen itu sendiri.

Sementara pada isu pengungsi Syria di Turki penulis berfokus pada FBO berlatar agama Islam, dimana pada kasus ini para pengungsi juga dimayoritasi oleh pemeluk agama Islam. Organisasi berlatar agama Islam di Turki berusaha untuk

menjauhkan para pengungsi yang kehilangan identitas mereka agar tidak terekspos pada pengaruh yang dibawah oleh NGOs dari negara asing. Hal ini didasari ketakutan bahwa institusi berlatar misionaris Kristen akan memanfaatkan kurangnya pendidikan pengungsi untuk membawa identitas baru dan memperlihatkan kesempatan yang lebih luas di Barat sehingga meninggalkan identitas budaya, agama, dan kepercayaan asal pengungsi (Mccarthy, 2017).

Dari kedua kasus ini ditemukan bahwa penyebaran kepercayaan oleh FBO dilakukan kepada kelompok pengungsi yang mayoritasnya sudah memeluk kepercayaan yang sama dan dijalankan melalui pendidikan pada pengungsi. Agama Kristen disebarkan pada pengungsi Karen melalui pendidikan yang dilaksanakan organisasi atau komunitas gereja, sementara Agama Islam disebarkan oleh organisasi atau pemerintah Turki pada pengungsi Syria melalui pendidikan yang kental ajaran Islam. Penulis melihat hal ini dilakukan untuk membangun hubungan yang baik dan menjaga kepercayaan kelompok pengungsi, serta menarik perhatian pengungsi lain agar tertarik bergabung ke dalam kepercayaan yang disebarkan oleh FBO.

Jayasinghe (2007) mengajukan sejumlah jalan keluar agar dilema terkait penyebaran agama yang diselipkan dalam program bantuan kemanusiaan oleh FBO tidak terjadi lagi, dimana upaya yang akan memberikan hasil paling efektif ialah dengan memisahkan kepercayaan dengan bantuan kemanusiaan. Selain itu ia juga menyebutkan bahwa informasi pada masyarakat atau pemerintah yang membutuhkan bantuan serta pembenahan code of conduct dapat menjadi jawaban. Barnett dan Stein juga memiliki pendapat yang sama seperti Jayasinghe, dimana pemisahan urusan agama dan bantuan kemanusiaan merupakan hal yang paling efektif. Barnett dan Stein melihat bahwa sekularisasi bantuan kemanusiaan dapat memberikan banyak keuntungan, hal ini dapat dilihat dari ciri khas organisasi sekuler, seperti tidak membawa misi agama tertentu, lebih profesional, dan biasanya lebih didukung oleh pemerintah atau badan yang berhubungan dengan program mereka (Khafagy, 2020).

REFERENCES

- Bell, D., & Carens, J. (2004). The Ethical Dilemmas of International Human Rights and Humanitarian NGOs: Reflections on a Dialogue Between Practitioners and Theorists. *Human Rights Quarterly*, 26, 300–329. <https://doi.org/10.1353/hrq.2004.0017>
- Bielefeld, W., & Cleveland, W. S. (2013). Defining Faith-Based Organizations and Understanding Them Through Research. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 42(3), 442–467. <https://doi.org/10.1177/0899764013484090>
- DeHaven, M. J., Hunter, I. B., Wilder, L., Walton, J. W., & Berry, J. (2004). Health Programs in Faith-Based Organizations: Are They Effective? *American Journal of Public Health*, 94(6), 1030–1036. <https://doi.org/10.2105/AJPH.94.6.1030>
- Horstmann, A. (2011). *Ethical Dilemmas and Identifications of Faith-Based Humanitarian Organizations in the Karen Refugee Crisis*. https://www.academia.edu/1446642/Ethical_Dilemmas_and_Identifications_of_Faith_Based_Humanitarian_Organizations_in_the_Karen_Refugee_Crisis
- Jayasinghe, S. (2007). Faith-based NGOs and healthcare in poor countries: A preliminary exploration of ethical issues. *Journal of Medical Ethics*, 33(11), 623. <https://doi.org/10.1136/jme.2006.018549>
- Karen Organization of Minnesota. (n.d.) *Karen History*. Retrieved October 24, 2024, from <https://mnkaren.org/history-culture/karen-history/>
- Khafagy, R. A. (2020). Faith-based organizations: Humanitarian mission or religious missionary. *Journal of International Humanitarian Action*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.1186/s41018-020-00080-6>
- Krafess, J. (2005). The influence of the Muslim religion in humanitarian aid. *International Review of the Red Cross*, 87(858), 327–342. <https://doi.org/10.1017/S1816383100181378>
- Orobator, A. (2008). *Key Ethical Issues in the Practices and Policies of Refugee Serving NGOs and Churches*.
- Owuoche, S., Nairobi, U. of, Nairobi, & Kenya. (2015). Faith-Based Organizations-State Relation and the Democratization Process in Kenya. *Open Access Library Journal*, 02(03), Article 03. <https://doi.org/10.4236/oalib.1101416>
- Özden, Ş. (2013). *MIGRATION POLICY CENTRE (MPC)*.
- Tezel McCarthy, A. (2017). Non-state actors and education as a humanitarian response: Role of faith-based organizations in education for Syrian refugees in Turkey. *Journal of International Humanitarian Action*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.1186/s41018-017-0028-x>
- UNHCR. (t.t.). *Refugees*. UNHCR. Diambil 24 Oktober 2024, dari <https://www.unhcr.org/about-unhcr/who-we-protect/refugees>
- Whaites, A. (1998). NGOs, Civil Society and the State: Avoiding Theoretical Extremes

in Real World Issues. *Development in Practice*, 8(3), 343–349.

Williams. (2010). *Intersections of Accountability: Measuring the Effectiveness of International Development NGOs*.
https://www.researchgate.net/publication/261933898_Intersections_of_Accountability_Measuring_the_Effectiveness_of_International_Development_NGOs